



Judul : Komisi XI DPR Kompak Pilih Agusman dan Hasan Fawzi: Fit and Proper Test Dewan Komisioner OJK
Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Fit And Proper Test Dewan Komisioner OJK

Komisi XI DPR Kompak Pilih Agusman Dan Hasan Fawzi

Komisi XI DPR kompak memilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK). Keduanya terpilih usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test*, kemarin.

AGUSMAN akan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan. Sedangkan Hasan Fauzi akan menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir menjelaskan, Agusman dan Hasan Fawzi diuji bersama dua calon lainnya, yakni Adi Budiarto dan Erwin Haryono.

"Jadi memilih dua dari empat (calon ADK OJK)," kata politisi senior Partai Golkar ini di Senayan, Jakarta, kemarin.

Setelah melalui musyawarah yang cukup panjang, lanjutnya, seluruh fraksi sepakat memilih Agusman dan Hasan Fawzi.

"Kami sudah sepakat, dua nama ini akan kami kirimkan untuk disetujui dalam rapat paripurna terdekat. Mudah-mudahan besok (hari ini) sudah diagendakan," ungkap politisi daerah pemilihan Sumatera Selatan ini.

"Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin, rapat internal memilih dua dari empat calon Komisioner OJK, selesai," kata Kahar menutup rapat Komisi XI.

Diketahui, Agusman sebelumnya menjabat Kepala Departemen Audit Internal di Bank Indonesia (BI). Saat uji kelayakan, Agusman membawa paper berjudul 'Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya: Tantangan dan Strategi Ke Depan'.

Agusman menjelaskan, berdasarkan data OJK, total aset sektor industri mengalami peningkatan menjadi Rp 1.744,39 triliun per Maret 2023, atau tumbuh 26 persen dibandingkan Desember 2020. Setiap kelompok dalam sektor industri ini juga mengalami peningkatan total aset.

"Hal ini tentu sangat mengembirakan. Mengingat, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pandemi Covid-19 yang sempat mengganggu jalannya bisnis dan perekonomian," jelasnya.

Namun demikian, sambung dia, jumlah pelaku industri mengalami penurunan, yaitu dari 735 perusahaan menjadi 700. Penurunan terbanyak dialami oleh kelompok lembaga pembiayaan, diikuti lembaga jasa keuangan lainnya, dan perusahaan modal ventura.

Satu-satunya kelompok yang mengalami adalah pelaku lembaga keuangan mikro, yaitu dari 226 menjadi 235.

Agusman meyakini, jumlah

pelaku industri keuangan ini akan terus meningkat karena koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan juga akan diawasi OJK. Hal ini sesuai pasal 202 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Terjadinya peningkatan total aset di tengah penurunan jumlah pelaku (industri dan jasa keuangan) mencerminkan bahwa sektor industri ini sedang dalam fase konsolidasi," jelasnya.

Sementara, Hasan Fawzi mengangkat tema 'Indonesia Menyongsong Era Baru Keuangan Digital'.

Hasan mengaku, tema itu hasil dari kristalisasi pemikiran, pemahaman dan pengalamannya selama kurang lebih 30 tahun berkarier di industri teknologi informasi dan keuangan.

Dijelaskan dia, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dan aktivitas di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

OJK juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Hasan bilang, OJK telah mengimplementasikan bauran kebijakan untuk memastikan ketahanan dan pemulihan ekonomi dengan baik. Ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang secara umum memiliki ketahanan yang baik. Stabilitas sektor jasa keuangan sangat terjaga di tengah-tengah dinamika dan tantangan perekonomian global.

"Dengan proyeksi terus bertumbuh secara berkelanjutan ke depannya," jelasnya.

Capaian ini, lanjut dia, merupakan hasil koordinasi yang baik antara OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Kami meyakini capaian ini juga berkat dukungan, arahan dan supervisi dari para anggota Komisi XI DPR," katanya. ■KAL